

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 48 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENGENDALI
DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)*



Oleh:

MHD TAMRIN PULUNGAN

NIM: 2113030094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 15 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Mhd Tamrin Pulungan
2113030094

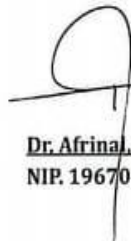
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah"** di susun oleh Mhd Tamrin Pulungan, NIM 2113030094 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui. Untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2025

Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.sos M.H
NIP. 196704192003121001

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc. MA
NIP. 198602240000001301

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Siyasah Tarfidziyah (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)" yang disusun oleh Mhd Tamrin Pulungan dengan NIM 2113030094. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan kritik dan saran dari tim penguji ujian sidang munaqasyah.

Disahkan di: Padang
Pada tanggal: 19 Februari 2026
Tim Penguji Ujian Munaqasyah

1 **Dr. Ridha Mulyani. SH. MH**
NIP. 196511081994032001
Penguji I

2 **Arlis. SH. MH. M.Ag**
NIP. 197808242014111003
Penguji II

3 **Dr. Afrinal. S.sos., M.H**
NIP. 196704192003121001
Penguji III

4 **Dr. Eskarni Ushalli. Lc. MA**
NIP. 198602242018011001
Penguji IV



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadi. M.Ag
NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif Siyasah Tanfidziyah, Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan serta mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 dan prinsip Siyasah Tanfidziyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi alat pembatas kecepatan di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan polisi tidur yang tidak memenuhi standar ukuran, bahan, warna, serta tidak melalui prosedur perizinan resmi. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi eksekutif, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum. Faktor penghambat implementasi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah guna mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan keadilan bagi pengguna jalan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Polisi Tidur, Siyasah Tanfidziyah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya penulis hantarkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjeput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit.

Ucapan terimakasih yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda (Nijon Pulungan) dan Ibunda (Hotmaria Sihite). Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Sholihin, M.Si., Ph.D dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Eskarni, Lc, MA.
4. Dosen penasehat akademik penulis selama penulis mengamban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Eskarni, Lc, MA. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Signifikan Penelitian.....	8
1.6. Studi Literature.....	8
1.7. Landasan Teori	13
1.8. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JALAN DALAM SIYASAH TANFIDZIYAH	
2.1. Jalan.....	18
2.1.1 Pengelompokan Jalan.....	19
2.1.2 Penyelenggara Jalan	23
2.1.3 Manfaat Jalan.....	23
2.1.4 Permasalahan Jalan.....	24
2.2. Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur.....	26
2.3. Siyash Tanfidziyah	29
2.3.1 Pengertian Siyash Tanfidziyah.....	29
2.3.2 Ruang Lingkup Siyash Tanfidziyah	31
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS	
3.1 Demografi Daerah Kabupaten Padang Lawas	34

3.1.1 Kependudukan	35
3.1.2 Ekonomi	39
3.1.3 Pendidikan.....	42
3.1.4 Keagamaan.....	45
3.1.5 Kesehatan.....	47
3.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	49
3.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas	49
3.2.2 Visi dan Misi.....	49
3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	52
3.2.4 Struktur Organisasi.....	53

BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TERHADAP PEMBUATAN TANGGUL JALAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS

4.1. Pemakaian Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah	54
4.1.1 Jenis Alat Pembatas Kecepatan.....	55
4.1.2 Kriteria Alat Pembatas Kecepatan.....	57
4.1.3 Alur Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan.....	65
4.1.4 Izin Pemasangan Alat Pebatas Kecepatan.....	66
4.2. Faktor Penghambat Pembatas Kecepatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan	70

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS